



LAPORAN KINERJA 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam, khususnya di bidang ketahanan pangan dan perikanan yang berkelanjutan.

LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKJIP ini menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada periode mendatang.

Lubuk Basung, Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM



ROSA DEWI WIRA, S.Pi. M.Si

Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19721209 200604 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada periode Renstra 2021-2025 memiliki 2 (dua) Tujuan dan 5 (lima) sasaran yang harus dicapai. Periode Renstra terbaru Tahun 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator dan 3 (tiga) Sasaran yang harus dicapai. Hasil Pengukuran realisasi terhadap target diatas baik periode Renstra 2021-2025 dan periode Renstra 2025-2029 dapat disimpulkan sebagai berikut :

-Periode Renstra 2021-2025

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 3) Target yang belum dilakukan penilaian kinerja karena nilai realisasi belum tersedia sebanyak 2 (dua) indikator.

-Periode Renstra 2025-2029

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target yang belum dilakukan penilaian kinerja karena nilai realisasi belum tersedia sebanyak 2 (dua) indikator.

Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Periode Renstra 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Indeks ketahanan pangan daerah	94	71,6	76,17%	Tinggi	Badan Pangan Nasional
		1.1	Meningkatnya diversifikasi pangan	85	88,1	103,64%	Sangat Tinggi	Bidang PKKPP
		1.2	Menurunnya kerawanan pangan daerah	7%(6 Nagari)	1,2 % (1 Nagari)	182,85%	Sangat Tinggi	Bidang KPG

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,86	*	-	-	BPS
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	0,73	0,77	105,4%	Sangat Tinggi	Bidang PBPT
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,34	1,33	99,2%	Sangat Tinggi	Bidang PDSPSP
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	77	*	-	-	Inspektorat

Periode Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB			Indeks ketahanan pangan daerah	86.93	71,6	82,36%	Badan Pangan Nasional	Sangat Tinggi
		1.1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan, dan Keamanan Pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	9.10	8,35	108,24%	Sangat Tinggi	DKPP
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	*	-	-	Inspektorat
				Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	4,66	*	-	-	BPS
		1.3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	41.854	41.870,96	100,4%	Sangat Tinggi	Bidang PBPT

Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar **Rp.4.262.075.205,-** atau 88.1% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan yaitu **Rp.4.838.030.834,-**. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Gambaran Organisasi	8
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	9
1.4 Dasar Hukum	11
1.5 Sistematika Laporan	11
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	14
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2021-2026	14
2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	18
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2025-2029	19
2.2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	20
2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026	26
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target	26
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Tahun 2024	32
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Akhir Tahun 2026	37
3.2 Capaian Kinerja Organisasi sesuai Renstra Tahun 2025 - 2029	41
3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target	41
3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Standar Nasional	46
3.4 Analisis Program dan Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	48
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan	57
3.6 Capaian Anggaran dan Program Kegiatan	59

BAB IV	66
PENUTUP	66
4.1 KESIMPULAN UMUM	66

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan dan sektor perikanan merupakan pilar fundamental dalam struktur pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Agam. Secara strategis, kedaulatan pangan bukan sekadar isu pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki mandat krusial untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, sekaligus mengelola potensi perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian sektor perikanan dihadapkan pada dinamika tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim yang tidak menentu, fluktuasi harga, hingga degradasi lingkungan pada ekosistem vital menuntut adanya respons kebijakan yang cepat dan inovatif. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam terus berupaya mengoptimalkan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan teknologi budidaya, serta peningkatan daya saing produk perikanan guna menjawab tantangan rendahnya konsumsi ikan dan ancaman kerawanan pangan di beberapa wilayah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini merupakan wujud konkret transparansi dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta anggaran yang telah dikelola sepanjang tahun berjalan. Laporan ini berfungsi sebagai dokumen evaluasi strategis untuk mengukur efektivitas program-program yang telah dijalankan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui refleksi atas capaian kinerja dan hambatan yang dialami, laporan ini diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan manajemen kinerja di masa mendatang, sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat terus memberikan dampak

positif yang nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Agam.

1.2 Gambaran Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022.

a. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
- d. Bidang kerawanan pangan dan gizi;
- e. Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
- g. Bidang penguatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- h. UPTD.

b. Tugas dan Fungsi

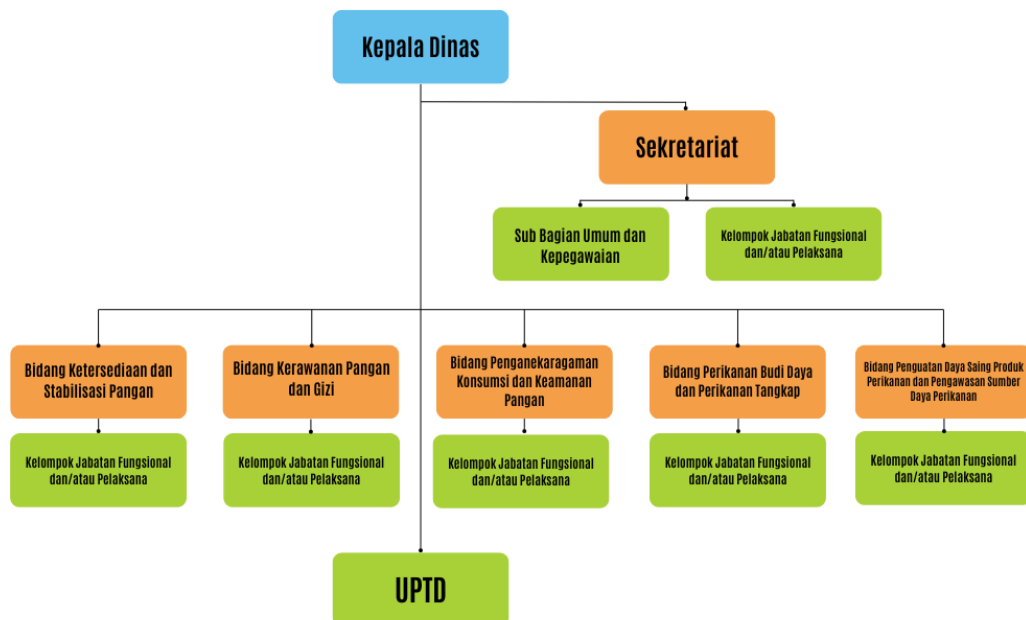
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi

Secara hierarki, struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam disusun berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Adapun bagan struktur organisasi dimaksud dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1 . Struktur Organisasi



1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau peristiwa yang bersifat mendasar, berjangka panjang, serta memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi di masa depan. Identifikasi isu strategis menjadi tahapan krusial yang dirumuskan secara sistematis dan berbasis data guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, adaptif, serta mampu menjawab tantangan lintas sektor.

Perumusan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap potensi

daerah dan permasalahan internal, dengan tetap menjaga keselarasan terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Penetapan isu ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program kerja tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga responsif terhadap dinamika lingkungan dinamis, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan degradasi kualitas lingkungan perairan. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perencanaan dan kondisi riil di lapangan, isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Optimalisasi Produksi dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kabupaten Agam;
2. Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Meskipun ketersediaan pangan secara umum tercukupi, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam belum mencapai angka optimal karena pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh unsur karbohidrat;
3. Penguatan Cadangan dan Stabilitas Distribusi Pangan Ketimpangan akses pangan antar wilayah dan fluktuasi harga komoditas musiman masih menjadi tantangan yang memicu kerentanan pangan pada tingkat rumah tangga;
4. Revitalisasi Ekosistem Perairan dan Budidaya Berkelanjutan Penurunan kualitas air di Danau Maninjau akibat beban budidaya yang melebihi daya dukung lingkungan (*over-capacity*) dan pencemaran limbah menjadi isu lingkungan yang sangat mendesak;
5. Modernisasi Perikanan dan Hilirisasi Produk Sektor perikanan masih terkendala oleh rendahnya kapasitas sarana prasarana nelayan, tingginya biaya produksi, serta lemahnya rantai nilai pada pengolahan pasca panen;
6. Pemberdayaan Kelembagaan dan Transformasi Digital SDM Terbatasnya literasi digital dan kemampuan manajemen kelembagaan pada kelompok tani serta nelayan menghambat daya saing di pasar global.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.5 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja pada Tahun 2025, serta realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang diintegrasikan dengan potensi sumber daya alam serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Agam. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021, Renstra ini ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2021-2026, guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selaras dengan masa jabatan Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah. Hal ini memastikan bahwa target kinerjanya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mewujudkan tata kelola pangan dan perikanan yang efektif. Dalam mendukung pencapaian sasaran makro daerah, perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara khusus mengacu dan berkontribusi langsung pada dua misi utama Kabupaten Agam, yaitu:

- **Misi ke-2:** "Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata."
- **Misi ke-4:** "Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas, dan berkarakter."

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2021-2026

Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Berdasarkan analisis isu strategis, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menetapkan tujuan

sebagai arah kebijakan jangka menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis. Sasaran strategis adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur, dan berkesinambungan setiap tahunnya. Dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkontribusi langsung pada dua tujuan daerah, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat;

Tujuan 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan berdaya saing.

Selaras dengan mandat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan tujuan dan sasaran internal yang difokuskan pada penguatan kedaulatan pangan dan optimalisasi sektor perikanan. Komitmen pencapaian kinerja tersebut, yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, hingga target tahunan periode 2021-2026, disajikan secara rinci pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2021-2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks ketahanan pangan daerah	86	88	90	92	94	96
		*1.1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan daerah	100	100	100	100	100	100
		*1.2	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81	82	83	84	85	86
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,68	4,71	4,75	4,80	4,86	4,90
		*2.1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,23	0,25	0,25	0,25	0,12	0,12
		*2.2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	7	9	0,83	0,82	0,82	0,82

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,41	1,53	1,23	1,36	1,34	1,32
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	* Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	75	75	-	-	-	-
				Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	76	76,5	77	77,5

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026
Keterangan : Tanda bintang (*) menunjukkan indikator yang mengalami penyesuaian dan ditampilkan pada tabel selanjutnya.

Sehubungan dengan adanya perubahan regulasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, sistem penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tidak lagi diterapkan sebagai indikator kinerja perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, indikator kinerja yang sebelumnya menggunakan PMPRB diganti menjadi Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai indikator kinerja yang lebih relevan dan selaras dengan kebijakan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang berlaku saat ini.

Selain perubahan indikator kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam juga melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja organisasi. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperkuat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, serta untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja. Terdapat pengurangan dan penggabungan sasaran yang memiliki irisan substansi dan arah capaian yang sama, sehingga struktur sasaran menjadi lebih sederhana, fokus, dan terukur. Indikator yang dilakukan penggabungan yaitu Persentase perikanan tangkap dan budidaya dan indikator yang dihilangkan berupa Persentase ketersediaan pangan daerah.

Seluruh perubahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tersebut telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan terbaru Tahun 2021-2025 dan selanjutnya dituangkan dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Organisasi terbaru sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perbaikan Tahun 2021-2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks ketahanan pangan daerah	86	88	90	92	94	96
		1.1	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81	82	83	84	85	86
		1.2	Menurunnya kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	-	-	-	-	7 (6 Nagari)	6 (5 Nagari)
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,68	4,71	4,75	4,80	4,86	4,90
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	-	-	-	-	0,73	0,75
		2.2	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,41	1,53	1,23	1,36	1,34	1,32
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	76	76,5	77	77,5

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026

2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan instansi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja tahunan yang memuat target kinerja yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja, serta memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian

Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam ditetapkan pada bulan Januari 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skala	85
2.	Menurunnya kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	%	7 (6 Nagari)
3.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	%	0,73
4.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	1,34
5.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor	77

2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Setelah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, pada Tahun 2025 dilakukan penyusunan Rencana Strategis baru untuk periode 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, dan kebutuhan pembangunan sektor ketahanan pangan dan perikanan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan capaian kinerja, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Pembaruan dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi pelaksanaan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam konteks kesinambungan pembangunan, Renstra 2025–2029 tetap melanjutkan program dan kegiatan strategis yang telah berjalan efektif pada periode sebelumnya, sekaligus melakukan penajaman dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung pencapaian **Misi ke-IV Kabupaten Agam, yaitu “Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berkeadilan.”** Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pembangunan sektor ketahanan pangan dan

perikanan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2025-2029

Seiring dengan berakhirnya periode Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, pada Renstra periode 2025–2029 dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari perubahan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada periode sebelumnya.

Pada periode 2021–2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkontribusi terhadap tujuan daerah **Meningkatkan Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat** serta **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing**. Memasuki periode 2025–2029, arah pembangunan daerah mengalami penajaman, sehingga tujuan yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diselaraskan menjadi:

Tujuan 1: Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan;

Tujuan 2: Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah.

Perubahan tujuan tersebut berdampak pada penyesuaian rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, tanpa menghilangkan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan efektif pada periode sebelumnya. Penajaman dilakukan untuk memperkuat kontribusi sektor ketahanan pangan dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan daerah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi periode 2025–2029 yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produksi dan daya saing perikanan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan periode 2025–2029 disajikan pada berikut:

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Organisasi Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB			Indeks ketahanan pangan daerah	86.93	86.94	86.95	86.96	86.97	86.98
		1.1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan ,Pemanfaatan, dan Keamanan Pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	9.10	9.03	8.66	8.28	7.91	7.54
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79	81	83	85	87
				Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	4,66	4,71	4,76	4,81	4,86	4,91
		1.3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	41.854	41.955	42.090	42.225	42.360	42.500

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode 2025-2029

2.2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, dan penganggaran.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra terbaru, serta penyesuaian alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi penajaman sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja, tanpa mengubah komitmen utama pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penyesuaian tersebut diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tetap berjalan efektif, terukur, dan akuntabel, serta

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan, dan Keamanan Pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Angka	9.10
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	41.854
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	77

2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk implementasi dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Penyusunan program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi secara efektif dan terukur. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap program dan kegiatan dirumuskan dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh alokasi anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal dan akuntabel.

Rincian program dan kegiatan Tahun 2025, beserta indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran, disajikan pada tabel berikut sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

**Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Tahun 2025**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)	90	4.169.587.599,-
2	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	110	666.464.780,-
3	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan (%)	19,40	210.437.196,-
4	Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	45	49.999.690,-
5	Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	8.170	69.744.860,-
6	Pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	30.750	628.729.450,-
7	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan (%)	20%	15.000.000,-
8	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)	338	147.879.990,08,-
Total				5.957.843.565,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Seiring dengan pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, program dan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan penyesuaian terhadap indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran agar selaras dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengurangi komitmen pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Rincian program dan kegiatan Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui APBD Perubahan, beserta indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran, disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Perubahan Tahun 2025**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN (%)	90	3.649.756.070,-
2	Peningkatan diversifikasi dan	Penurunan jumlah konsumsi	110	457.118.110,-

	ketahanan pangan masyarakat	beras (kg/kapita/tahun)		
3	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan (%)	19,40	120.562.536,-
4	Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	45	29.755.390,-
5	Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	8.170	58.236.860,-
6	Pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	30.750	393.046.500,-
7	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan (%)	20	4.179.000,-
8	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan (orang)	338	125.376.368,-
Total				4.838.030.834,-

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi secara transparan kepada pihak pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam melaksanakan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP menyajikan tingkat pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 dan 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada setiap indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perangkat daerah. Interpretasi terhadap hasil pengukuran tersebut, diklasifikasikan ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah sesuai dengan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target kinerja. Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam secara berkala melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu-isu strategis yang

mempengaruhi kinerja organisasi. Hasil pengukuran IKU Tahun 2025 selanjutnya disajikan dan dianalisis pada subbab berikutnya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 dengan realisasinya saat ini. Perbandingan masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Indeks ketahanan pangan daerah	94	71,6	76,17%	Tinggi	Badan Pangan Nasional
		1.1	Meningkatnya diversifikasi pangan	85	88,1	103,64%	Sangat Tinggi	Bidang PKKP
		1.2	Menurunnya kerawanan pangan daerah	7%(6 Nagari)	1,2 % (1 Nagari)	182,85%	Sangat Tinggi	Bidang KPG
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,86	*	-	-	BPS
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan	0,73	0,77	105,4%	Sangat Tinggi	Bidang PBPT
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	1,34	1,33	99,2%	Sangat Tinggi	Bidang PDSPSP
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	77	*	-	-	Inspektorat

Keterangan : *Data belum dirilis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 3) Target yang belum dilakukan penilaian kinerja karena nilai realisasi belum tersedia sebanyak 2 (dua) indikator.

Selanjutnya, masing-masing indikator kinerja dianalisis secara terperinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, termasuk penjelasan atas indikator yang melampaui target, indikator yang belum mencapai target, serta indikator yang belum dapat dinilai akibat belum tersedianya data realisasi. Uraian analisis perindikator dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan Pangan bersifat multidimensi sehingga penilaian terhadap situasi pangan melibatkan serangkaian indikator. Indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional.

Cut-off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 sebesar 71,6%, dengan capaian terhadap target sebesar 76,17%. Capaian tersebut masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pengkategorian capaian kinerja. Meskipun realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 94, namun berdasarkan *cut off point*

Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Kabupaten Agam berada pada kategori tahan pangan.

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok IKP Daerah 1 adalah Kabupaten/Kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi daripada Kabupaten/Kota dengan kelompok di atasnya. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Kabupaten Agam berada pada Kelompok IKP Daerah 5 yang artinya berada pada kondisi ketahanan pangan yang baik (Zona Hijau). Kabupaten Agam berada pada peringkat 266 dari 416 Kabupaten se-Indonesia yang dinilai oleh Badan Pangan Nasional.

Indikator Kinerja 2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH menjadi indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam suatu daerah, semakin tinggi skor PPH (maksimal 100) maka semakin beragam pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Skor PPH diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS kemudian diolah menggunakan Aplikasi Harmonisasi PPH Data Susenas.

Berdasarkan tabel di atas, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam sebesar 88,1, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 85. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Agam telah menunjukkan pola konsumsi pangan yang semakin beragam, berimbang, dan berkualitas.

Kondisi tersebut tercermin pada tabel kelompok pangan, di mana sebagian besar skor PPH pada masing-masing kelompok pangan telah mendekati skor PPH ideal. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan (gap) pada beberapa kelompok pangan, antara lain umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah, yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan konsumsi pada kelompok pangan tersebut agar sesuai dengan komposisi pangan ideal. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 dengan angka ideal adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Maksimal	Skor PPH 2025	Gap
1	Padi-padian	25	25	0
2	Umbi-umbian	2,5	0,91	1,59
3	Pangan hewani	24	23,63	0,37
4	Minyak dan lemak	5	5	0
5	Buah/biji berminyak	1	1	0
6	Kacang-kacangan	10	4,97	5,03
7	Gula	2,5	1,66	0,84
8	Sayur dan buah	30	25,92	4,08
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		100	88,1	11,9

Indikator 3. Persentase Nagari Rawan Pangan

Persentase nagari rawan pangan merupakan persentase jumlah nagari yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 dari total nagari di Kabupaten Agam (menggunakan base data 82 nagari). Perhitungan dan analisa nagari rawan pangan dilakukan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2025. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) adalah sebuah alat visualisasi yang berguna untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap masalah ketahanan pangan. Peta ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketahanan pangan suatu daerah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau bahkan desa.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Nagari Rawan Pangan, diketahui bahwa target yang ditetapkan sebesar 7% atau 6 nagari, sedangkan realisasi berada pada angka 1,2% atau 1 nagari. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 182,85%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil pemetaan FSVA nagari yang termasuk rawan pangan prioritas 3 yaitu nagari koto tuo kecamatan IV Koto.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam meningkatkan akses, ketersediaan, serta pemanfaatan pangan di tingkat nagari. Meskipun demikian, keberadaan 1 nagari yang masih tergolong rawan pangan tetap memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan melalui intervensi yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan lokal. Berikut hasil pemetaan FSVA tahun 2025 :

Prioritas	Jumlah Nagari
1	0
2	0
3	1 (Nagari Koto Tuo)
4	21
5	13
6	47
Total	82

Indikator Kinerja 4. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perikanan terhadap total nilai ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah ini dihitung dengan mengurangi nilai input (seperti biaya produksi, bahan baku, dan tenaga kerja) dari nilai output (seperti hasil penjualan ikan dan produk perikanan lainnya). Semakin tinggi kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB maka semakin penting peran sektor perikanan terhadap perekonomian suatu daerah. Data kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja 5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan volume produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dibandingkan dengan periode sebelumnya sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas perikanan melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan tabel di atas, indikator Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan memiliki target n sebesar 0,73, sedangkan realisasinya sebesar 0,77. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 105,4%, yang menunjukkan bahwa kinerja peningkatan produksi perikanan telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sektor perikanan. Kenaikan tersebut dapat dilihat lebih rinci pada data produksi perikanan tangkap dan budi daya pada tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

No.	Uraian	2024	2025	% Peningkatan
1	Produksi Perikanan Tangkap	8.139,98	8.171,05	0,38%
2	Produksi Perikanan Budi Daya	33.409,39	33.699,91	0,86%
Total		41.549,37	41.870,96	0,77%

Indikator Kinerja 6. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

Indikator Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan merupakan indikator kinerja strategis yang merepresentasikan upaya pengolahan hasil perikanan segar menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan daya saing dan masa simpan yang lebih optimal. Pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas intervensi Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengakselerasi hilirisasi industri perikanan melalui program pembinaan mutu, standardisasi keamanan pangan, serta diversifikasi produk.

Berdasarkan tabel diatas, target kinerja peningkatan produksi olahan perikanan ditetapkan sebesar 1,34%, dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 1,33%. Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 99,2%, yang menurut skala interval evaluasi kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Tingginya capaian kinerja ini memberikan gambaran bahwa program pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Agam telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi komoditas perikanan. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi dalam pendampingan teknis yang konsisten, sehingga

mampu menjaga keberlangsungan produksi di tingkat pengolah. Capaian ini menjadi modal penting bagi daerah dalam mempertahankan keberlangsungan usaha perikanan sekaligus memastikan bahwa produk olahan daerah mampu memenuhi standar kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Indikator Kinerja 7. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur seberapa efektifitas dan efesiensi kinerja perangkat daerah. Penilaian bertujuan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja (IKU) dan penggunaan sumberdaya (Renja) secara transparan dan akuntabel. Hingga dokumen ini disusun, hasil penilaian SAKIP untuk tahun berjalan masih dalam proses evaluasi oleh pihak Inspektorat, sehingga nilai akhir maupun predikat kinerja perangkat daerah belum dapat dicantumkan dalam laporan ini.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Tahun 2024

Selain membandingkan realisasi dengan target di tahun berjalan, evaluasi juga dilakukan dengan melihat perbandingan antara capaian tahun 2025 dengan hasil yang didapat pada tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dan perkembangan hasil kerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran jangka menengah yang telah direncanakan. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui apakah hasil kerja mengalami peningkatan atau memerlukan perbaikan di masa depan. Rincian perbandingan data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)			
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks ketahanan pangan daerah	92	86,92	94,47	94	71,6	76,17%
		1.1	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	86,7	81	93,42	85	88,1	103,64%

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)			
		1.2	Menurunnya kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	10	1,22	187,8	7%(6 Nagari)	1,2 % (1 Nagari)	182,85%
2	Meningkatnya produksi usaha perikanan			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,80	4,66	97%	4,86	*	-
		2.1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	0,75	7,14	952	0,73	0,77	105,4%
		2.3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,36	1,09	80,14%	1,34	1,33	99,2%
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3.1	Meningkatnya tata kelola OPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	75	75,20	100,26%	77	*	-

Keterangan : *Data belum dirilis

Indikator Kinerja 1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan, yang sejalan dengan penurunan capaian terhadap target dari 94,47% pada Tahun 2024 menjadi 76,17% pada Tahun 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh nilai indeks ketersediaan pangan yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 59,84, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan nilai Indeks Ketahanan Pangan Daerah secara keseluruhan. Selain itu, indeks pemanfaatan pangan yang tercatat sebesar 74,40 menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga, termasuk kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, masih memerlukan penguatan.

Sementara itu, indeks keterjangkauan pangan berada pada kondisi yang relatif lebih baik. Namun demikian, capaian pada aspek keterjangkauan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi keterbatasan pada aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan, sehingga secara agregat memengaruhi

nilai Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam pada Tahun 2025. Berdasarkan *cut off point* Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Kabupaten Agam masih berada pada kategori tahan pangan.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun berikutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu memfokuskan upaya pada penguatan aspek ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan strategis dan penguatan cadangan pangan daerah, serta meningkatkan aspek pemanfaatan pangan melalui edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor dan pemutakhiran data ketahanan pangan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja 2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Pada Tahun 2024, Skor PPH terealisasi sebesar 81 dari target 86,7 dengan capaian 93,42%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat telah mengarah pada keberagaman, namun belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada Tahun 2025, Skor PPH mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 88,1 dari target 85, sehingga capaian mencapai 103,64%.

Skor PPH yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Agam semakin beragam dan seimbang. Kondisi tersebut tercermin dari semakin mendekatinya skor PPH pada masing-masing kelompok pangan terhadap skor PPH ideal. Peningkatan Skor PPH pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta adanya dukungan program pemerintah daerah dalam pemanfaatan pangan lokal dan diversifikasi konsumsi pangan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan edukasi konsumsi pangan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang positif.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu mempertahankan dan meningkatkan capaian Skor PPH melalui penguatan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, optimalisasi pemanfaatan

pangan lokal, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja 3. Persentase Nagari Rawan Pangan

Persentase nagari rawan pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, persentase nagari rawan pangan terealisasi sebesar 1,22% atau setara dengan 1 nagari, dari target sebesar 10 nagari, sehingga capaian kinerja mencapai 187,8%. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target persentase nagari rawan pangan ditetapkan sebesar 7% atau setara dengan 6 nagari, dengan realisasi sebesar 1,2% atau tetap 1 nagari, sehingga capaian mencapai 182,85%.

Perlu menjadi catatan bahwa meskipun secara target terjadi penurunan jumlah nagari rawan pangan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, namun secara realisasi kondisi kerawanan pangan relatif stabil, yaitu hanya terdapat 1 nagari yang termasuk dalam kategori rawan pangan pada kedua tahun tersebut. Nagari yang masih tergolong rawan pangan berada pada prioritas 3, yaitu Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketahanan pangan wilayah Kabupaten Agam berada dalam kondisi baik.

Capaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan kerawanan pangan yang ditunjukkan dengan tidak bertambahnya jumlah nagari rawan pangan pada Tahun 2025, meskipun target yang ditetapkan semakin ketat. Upaya tersebut didukung oleh pelaksanaan program pencegahan kerawanan pangan, pemantauan wilayah rawan pangan secara berkala, serta penguatan koordinasi lintas sektor, sekaligus memperkuat upaya penanganan pada nagari yang masih tergolong rawan pangan.

Indikator Kinerja 4. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Capaian kinerja indikator kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum dapat dianalisis, karena data realisasi Tahun 2025 sampai dengan periode pelaporan ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat pencapaian indikator tersebut akan dilakukan setelah data resmi tersedia dan dipublikasikan oleh BPS, serta akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Indikator Kinerja 5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan tren kenaikan dan capaian kinerja yang melampaui target. Pada periode sebelumnya, target peningkatan produksi ditetapkan sebesar 0,75% dengan realisasi mencapai 7,14%, sehingga capaian kinerja sebesar 952%. Selanjutnya, pada periode pelaporan berikutnya, target ditetapkan sebesar 0,73% dengan realisasi sebesar 0,77%, sehingga capaian mencapai 105,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Agam terus mengalami peningkatan secara positif.

Keberhasilan capaian tersebut mencerminkan efektivitas berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan subsektor perikanan tangkap dan budidaya. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait turut berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan.

Fokus Pemerintah Kabupaten Agam diarahkan pada penguatan peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan bernilai tambah, melalui penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan tangkap, serta penguatan kelembagaan dan akses pasar bagi pelaku usaha perikanan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga tren peningkatan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Indikator Kinerja 6. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

Persentase peningkatan produksi olahan perikanan menunjukkan perbaikan kinerja dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Pada Tahun 2024, target peningkatan produksi olahan perikanan ditetapkan sebesar 1,36% dengan realisasi sebesar 1,09%, sehingga capaian kinerja mencapai 80,14%. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 1,34% dengan realisasi sebesar 1,33%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 99,2%.

Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dan mendekati target yang ditetapkan.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan program pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan. Berbagai upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, peningkatan kualitas produk olahan, serta dukungan fasilitas produksi dan penguatan standar mutu turut mendorong peningkatan produksi olahan perikanan. Selain itu, meningkatnya minat pelaku usaha dalam mengembangkan produk olahan bernilai tambah juga berkontribusi terhadap perbaikan kinerja indikator ini.

Fokus Pemerintah Kabupaten Agam diarahkan pada penguatan daya saing produk olahan perikanan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan inovasi dan teknologi pengolahan, serta perluasan akses pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga tren peningkatan produksi olahan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Indikator Kinerja 7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dapat dianalisis dan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, mengingat data hasil penilaian Nilai SAKIP sampai dengan periode pelaporan belum dirilis oleh Inspektorat. Oleh karena itu, tingkat pencapaian indikator tersebut belum dapat ditentukan pada periode ini. Penilaian capaian indikator akan dilaksanakan setelah hasil penilaian resmi diterbitkan dan ditetapkan oleh Inspektorat.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Akhir Tahun 2026

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara capaian kinerja dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan. Hasil analisis tersebut

diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	86,92	71,6	96	74,5%
1.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81	88,1	86	102,44%
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	1,22	1,2 % (1 Nagari)	5,4% (5 Nagari)	177,7%
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4.66	*	4,90	*
3.	Meningkatnya produksi perikanan	***Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	7,14	0,77	0,79	97,4%
4.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1.09	1,33	1,32	100,75%
C	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	75,20	**	77,5	*

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS

**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

***Perubahan target karena adanya perubahan indikator

Berdasarkan Tabel 10 tentang Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode, terdapat tiga indikator telah melampaui target akhir RPJMD, dua indikator belum mencapai target, dan dua indikator belum dapat dinilai capaian akhirnya karena data pendukung belum tersedia hingga periode pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan hasil yang positif, meskipun masih diperlukan upaya penguatan pada beberapa indikator agar seluruh target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Indikator Kinerja 1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam pada Tahun 2025 tercatat sebesar 71,6. Jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 96, capaian tersebut menunjukkan bahwa target jangka menengah belum sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, nilai indeks yang diperoleh masih mencerminkan kondisi daerah yang berada pada kategori tahan pangan berdasarkan klasifikasi indeks ketahanan pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan, berbagai upaya yang telah dilaksanakan tetap memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan daerah. Pada periode berikutnya, peningkatan kinerja akan terus diarahkan melalui penguatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dengan nilai sebesar 88,1. Capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 86. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Agam semakin beragam dan mendekati komposisi pangan ideal. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi seimbang. Pada tahun selanjutnya, upaya akan tetap difokuskan pada penguatan diversifikasi pangan, promosi pangan lokal, serta edukasi berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pola konsumsi masyarakat.

Indikator Kinerja 3. Persentase Nagari Rawan Pangan

Persentase nagari rawan pangan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 1,2 persen atau setara dengan 1 nagari. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 5,4 persen atau sekitar 5 nagari, capaian ini menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik dari yang direncanakan. Mengingat indikator ini bersifat negatif, penurunan persentase nagari rawan pangan mencerminkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi ketahanan pangan yang dilaksanakan di tingkat nagari telah memberikan dampak nyata. Pada periode perencanaan berikutnya,

upaya akan diarahkan pada pemantauan kondisi pangan secara berkelanjutan, penguatan cadangan pangan nagari, serta intervensi dini pada wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan.

Indikator Kinerja 4. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap (PDRB)

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Indikator kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis capaian secara menyeluruh, mengingat data resmi masih menunggu rilis dari instansi terkait. Target akhir RPJMD untuk indikator ini ditetapkan sebesar 4,90 persen. Meskipun demikian, berbagai program dan kegiatan tetap diarahkan untuk mendorong peningkatan peran sektor perikanan dalam perekonomian daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya peningkatan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas usaha perikanan, pengembangan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan, serta penguatan akses pasar guna mendukung kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah.

Indikator Kinerja 5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Realisasi persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,77 persen, masih berada di bawah target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,94 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana produksi, kondisi alam, serta dinamika usaha perikanan di lapangan. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan adanya peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun pelaksanaan berikutnya, peningkatan kinerja akan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pendampingan teknis kepada pelaku usaha perikanan, serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja 6. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

Persentase peningkatan produksi olahan perikanan pada Tahun 2025 mencapai 1,33 persen dan telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 1,32 persen. Capaian ini mencerminkan semakin berkembangnya kegiatan

pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Agam yang mampu memberikan nilai tambah bagi produk perikanan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan, baik melalui pembinaan, fasilitasi perizinan, maupun peningkatan kualitas produk. Pada periode selanjutnya, upaya akan difokuskan pada penguatan kapasitas UMKM, peningkatan standar mutu dan keamanan pangan, serta perluasan jaringan pemasaran produk olahan perikanan.

Indikator Kinerja 7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 belum dapat dianalisis karena hasil penilaian resmi dari Inspektorat belum diterbitkan hingga periode pelaporan. Target akhir RPJMD untuk indikator ini ditetapkan sebesar 77,5. Meskipun demikian, berbagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada periode evaluasi berikutnya, peningkatan akuntabilitas kinerja akan terus dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta penguatan evaluasi internal.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi sesuai Renstra Tahun 2025 - 2029

3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan. Seiring dengan ditetapkannya Renstra terbaru, terjadi penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penilaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja pada indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berjalan dengan realisasi capaian yang diperoleh. Perbandingan capaian kinerja untuk masing-masing indikator tersebut disajikan pada uraian berikut :

Indikator Kinerja 1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah dan Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, terdapat perubahan mendasar dibandingkan dengan Renstra periode sebelumnya. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian tujuan pembangunan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan, agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan nasional, dan kondisi riil Kabupaten Agam.

Tabel 3.4 Indeks Ketahanan Pangan dan Rasio PDRB

Periode Renstra	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Kategori
2021-2026	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	94	71,6	76,17%	Badan Pangan Nasional	Tinggi
	Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,86	*	*	Badan Pusat Statistik	*
2025-2029	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Indeks ketahanan pangan daerah	86,93	71,6	82,36%	Badan Pangan Nasional	Sangat Tinggi
		Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	4,66	*	*	Badan Pusat Statistik	*

Pada Renstra periode sebelumnya, tujuan pembangunan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi usaha perikanan secara terpisah. Dalam Renstra 2025–2029, tujuan tersebut dirumuskan secara lebih terintegrasi, yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ketahanan pangan, tetapi juga pada penguatan peran sektor perikanan dalam mendukung perekonomian daerah.

Sejalan dengan perubahan tujuan, indikator kinerja utama juga mengalami penyesuaian, khususnya pada Indeks Ketahanan Pangan Daerah yang tetap dipertahankan sebagai indikator utama namun dengan target yang lebih realistis. Target Renstra 2025–2029 sebesar 86,93 ditetapkan berdasarkan capaian historis, tren perkembangan, serta metodologi

penghitungan indeks yang berlaku. Penyesuaian ini dilakukan karena target pada Renstra sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan kurang rasional untuk dicapai dalam satu periode perencanaan, mengingat kompleksitas variabel penyusun indeks yang sebagian berada di luar kewenangan langsung perangkat daerah.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 menunjukkan realisasi Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Agam sebesar 71,6 dengan capaian sebesar 82,36 persen terhadap target Renstra 2025–2029 dan termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan belum dapat dianalisis pada tahun pelaporan karena data dari Badan Pusat Statistik belum tersedia, namun tetap dipertahankan sebagai indikator strategis yang akan dievaluasi secara komprehensif pada periode selanjutnya.

Indikator Kinerja 2. Prevalence of Undernourishment (PoU)

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 pada periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, terjadi penyesuaian indikator kinerja dari Renstra periode sebelumnya. Penyesuaian ini mencakup perubahan sasaran, indikator, serta metode pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan hasil pembangunan ketahanan pangan, khususnya dari aspek kecukupan konsumsi energi penduduk.

Tabel 3.5 Prevalence of Undernourishment (PoU)

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Kategori
2021-2026	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	85	88,1	103,64%	Sangat Tinggi	Bidang PKKP
	Menurunnya kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	7%(6 Nagari)	1,2 % (1 Nagari)	182,85%	Sangat Tinggi	Bidang KPG
2025-2029	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan, dan Keamanan Pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	9.10	8,35	108,24%	Sangat Tinggi	DKPP

Pada Renstra periode sebelumnya (2021–2026), pengukuran kinerja ketahanan pangan masih menggunakan indikator antara, seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase nagari rawan pangan. Kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi PPH sebesar 88,1 dari target 85 dan penurunan persentase nagari rawan pangan menjadi 1,2 persen dari target 7 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan

pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan serta mengurangi tingkat kerawanan pangan wilayah.

Dalam Renstra 2025–2029, indikator kinerja utama diarahkan pada *Prevalence of Undernourishment (PoU)* sebagai indikator hasil (outcome). PoU merupakan indikator negatif, sehingga semakin rendah nilai yang dicapai, semakin baik kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan selisih antara target dan realisasi terhadap target yang ditetapkan. Melalui target PoU sebesar 9,10 persen dan realisasi sebesar 8,35 persen, menunjukkan bahwa tingkat penduduk dengan asupan energi di bawah kebutuhan minimum berada di bawah batas target yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian PoU Kabupaten Agam sebesar 108,24 persen dan termasuk kategori sangat tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun nilai realisasi PoU masih perlu terus ditekan, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan yang signifikan dalam upaya penurunan tingkat kekurangan gizi masyarakat Kabupaten Agam.

Indikator Kinerja 3. Jumlah Produksi Perikanan

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 (Jumlah Produksi Perikanan) dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, terlihat adanya penyesuaian indikator kinerja dari Renstra periode 2021–2026 ke Renstra 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan semakin mampu menggambarkan kinerja pembangunan sektor perikanan secara lebih nyata, terukur, dan relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.6 Jumlah Produksi Perikanan

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Kategori
2021-2026	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	0,73	0,77	105,4%	Sangat Tinggi	Bidang PBPT
2025-2029	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	41.854	41.870,96	100,4%	Sangat Tinggi	Bidang PBPT

Pada Renstra 2021–2026, sasaran peningkatan produksi perikanan diukur melalui persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Indikator ini bersifat relatif karena membandingkan produksi dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 0,73 persen, realisasi mencapai 0,77 persen atau setara dengan capaian kinerja sebesar 105,4 persen dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor perikanan pada periode tersebut telah melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan.

Memasuki Renstra 2025–2029, indikator kinerja disesuaikan menjadi Jumlah Produksi Perikanan dalam satuan absolut. Perubahan ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja tidak hanya menunjukkan laju pertumbuhan, tetapi juga menggambarkan secara langsung volume hasil perikanan yang dihasilkan. Pada tahun awal Renstra 2025–2029 ditetapkan target produksi sebesar 41.854 ton, dengan realisasi sebesar 41.870,96 ton, sehingga capaian kinerja mencapai 100,4 persen dan kembali masuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan Kabupaten Agam tidak hanya mampu mempertahankan kinerja dari periode sebelumnya, tetapi juga berhasil memenuhi bahkan melampaui target produksi yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketersediaan pangan berbasis ikan serta penguatan perekonomian masyarakat.

Perubahan indikator dari persentase peningkatan menjadi jumlah produksi dilakukan karena indikator persentase bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi data tahun sebelumnya. Ketika basis data awal sudah tinggi, peningkatan kecil saja dapat menghasilkan persentase yang terlihat rendah, meskipun secara absolut produksi tetap besar. Sebaliknya, indikator jumlah produksi dalam satuan ton memberikan gambaran yang lebih konkret dan operasional bagi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sektor perikanan, sehingga memperkuat orientasi kinerja berbasis hasil nyata (output dan outcome) dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

Indikator Kinerja 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.7 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Periode Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Kategori
2021-2026	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	*	*	*	Inspektorat
2025-2029	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	*	*	*	Inspektorat

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 (Nilai SAKIP Perangkat Daerah), tidak terdapat perubahan indikator antara Renstra periode 2021–2026 dan Renstra 2025–2029, baik dari sisi sasaran maupun jenis indikator yang digunakan. Pada kedua periode tersebut, sasaran yang diukur tetap meningkatnya tata kelola perangkat daerah dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan target yang sama yaitu sebesar 77. Nilai realisasi pada tahun berjalan masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung, namun konsistensi indikator ini menunjukkan bahwa arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan tetap menjadi prioritas utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja berdasarkan target Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dengan standar nasional dilakukan untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja daerah dalam konteks pencapaian nasional. Berdasarkan tujuh indikator kinerja yang digunakan, hanya satu indikator yang memiliki standar nasional yang ditetapkan secara resmi, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Oleh karena itu, perbandingan dengan standar nasional pada tabel berikut difokuskan pada indikator tersebut, sementara indikator lainnya belum memiliki standar nasional yang dapat digunakan sebagai pembandingan. Perbandingan capaian kinerja berdasarkan target Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dengan Standar Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	71,6	-	-
1.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	88,1	94	93,7%
2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	1,2 % (1 Nagari)	-	-
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	*	-	-
3.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	0,77	-	-
4.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,33	-	-
C	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	**	-	-

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS

**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai RB diganti dengan Nilai SAKIP)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Agam pada Tahun 2025 tercatat sebesar 88,1, masih berada di bawah Standar Nasional Skor Pola Pangan Harapan yang ditetapkan sebesar 94. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan komposisi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan sesuai dengan pola pangan harapan. Rendahnya skor PPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Agam terhadap kelompok pangan padi-padian masih berada di atas jumlah ideal dalam Pola Pangan Harapan. Konsumsi energi dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 1.073 kkal/kapita/hari, melebihi jumlah ideal sebesar 1.050 kkal/kapita/hari, sementara konsumsi umbi-umbian sebagai pangan sumber karbohidrat alternatif masih berada pada tingkat yang sangat rendah dibandingkan standar ideal.
- b. Pola konsumsi pangan sumber lauk pauk masih belum seimbang, khususnya pada kelompok pangan kacang-kacangan. Konsumsi energi dari kelompok kacang-kacangan tercatat sebesar 50 kkal/kapita/hari, jauh di bawah jumlah ideal yang dianjurkan sebesar 105 kkal/kapita/hari.
- c. Pola konsumsi sayur dan buah juga masih berada di bawah standar ideal yang dianjurkan dalam Pola Pangan Harapan. Konsumsi energi dari

kelompok pangan sayur dan buah tercatat sebesar 93 kkal/kapita/hari, lebih rendah dibandingkan jumlah ideal sebesar 126 kkal/kapita/hari.

- d. Selain faktor kuantitatif konsumsi pangan, pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti karakteristik pangan, karakteristik individu, kondisi lingkungan, nilai agama, sosial budaya, tingkat ekonomi, sistem distribusi pangan, serta ketersediaan pangan di wilayah setempat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) akan terus dilakukan melalui penguatan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal non-beras, khususnya umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan buah, akan terus didorong melalui program diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Upaya ini juga didukung dengan penguatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pengembangan pekarangan pangan lestari, serta sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

3.4 Analisis Program dan Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan menunjukkan capaian kinerja yang beragam, baik yang telah memenuhi target maupun yang belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Variasi capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan di lapangan, ketersediaan dan dukungan anggaran, efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dengan rumus sebagai berikut :

$$(X) = \frac{\% \text{ Capaian kinerja}}{\% \text{ Capaian program}} \quad \text{yang mana jika,}$$

$X > 1$ maka Mendukung dengan faktor lain

$X = 1$ maka Mendukung

$X < 1$ maka tidak mendukung

Tabel 3.9 Analisis Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/SubKegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	76.17%				
a.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	103.64%	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (Kg/ perkapita/ tahun)	115.95%	0,89 (Tidak Menunjang)
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	125%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	100%	
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	125%	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	186%	0,55 (Tidak Menunjang)
				Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/SubKegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
b.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	182,85%	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penurunan Nagari Rawan Pangan	0.06%	3047,5 (Menunjang)
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutakhirkan	100%	
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kab/ kota	100%	
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi kab/ Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/ Kota	100%	
2.	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	*				
c.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	105,4%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi ikan Tangkap	100.01%	1,05 (Menunjang)
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat Kapasitasnya	0%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/SubKegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	100%	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	109.59%	0,96 (Tidak Menunjang)
				Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0%	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalan	145%	0,72 (Tidak Menunjang)
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	100%	1 (Menunjang)
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	99%	
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/SubKegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	*	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN	111%	*
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%	
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantoryang Disediakan	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/SubKegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	100%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	

Sasaran 1. Meningkatnya diversifikasi pangan dipengaruhi oleh berbagai intervensi yang dilakukan melalui program-program yang dirancang khusus untuk mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Program pertama adalah *Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*, yang berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa program ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan diversifikasi pangan. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakidealan program tersebut, melainkan karena mewujudkan diversifikasi pangan yang menyeluruh membutuhkan intervensi yang beragam, berkelanjutan, dan dilakukan secara konsisten. Perubahan pola pangan masyarakat tidak bisa terjadi secara instan, melainkan harus dilakukan secara perlahan dengan pendekatan yang terencana, seperti edukasi gizi, promosi konsumsi pangan lokal, serta peningkatan akses terhadap berbagai sumber pangan bergizi.

Program kedua adalah *Pengawasan Keamanan Pangan* berdasarkan tabel di atas juga menunjukkan hasil yang belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran diversifikasi pangan. Pengawasan keamanan pangan yang dilakukan masih terbatas dalam skala kecil. Hal ini berdampak pada rendahnya jangkauan program terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perlu dilakukan perluasan cakupan pengawasan keamanan pangan, baik dari sisi distribusi, produksi, maupun konsumsi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengawasan dan pemantauan kualitas pangan juga menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan beragam di setiap wilayah.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam meningkatkan diversifikasi pangan tidak hanya bergantung pada satu atau dua program saja, melainkan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga terkait lainnya, sangat penting untuk mendukung perubahan pola konsumsi masyarakat. Program-program edukasi tentang pentingnya diversifikasi pangan, kampanye gizi seimbang, serta dukungan terhadap produksi pangan lokal yang beragam dapat mempercepat proses transformasi ini. Melalui intervensi yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan upaya diversifikasi pangan dapat berjalan lebih efektif.

Sasaran 2. Menurunnya tingkat kerawanan pangan dapat melalui pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini terlihat pada tabel di atas, yang menunjukkan bahwa program penanganan kerawanan pangan berkontribusi signifikan dalam mencapai sasaran penurunan tingkat kerawanan pangan. Selain itu, faktor penting yang turut memengaruhi penurunan tersebut adalah intervensi yang tepat sasaran serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Melalui sinergi ini, wilayah-wilayah yang rentan terhadap krisis pangan dapat diidentifikasi secara lebih akurat, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan yang disertai dengan kolaborasi bersama stakeholder terkait memberikan dampak signifikan dalam mengurangi jumlah nagari rawan pangan di Kabupaten Agam. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek penyediaan pangan, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Melalui pendekatan ini, masyarakat di daerah rawan pangan dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 3. Meningkatnya produksi perikanan didukung oleh dua program utama, yaitu *Program Pengelolaan Perikanan Tangkap* dan *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa program pengelolaan perikanan tangkap memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Intervensi yang dilakukan melalui program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian sarana dan prasarana kepada nelayan. Melalui pemberian bantuan tersebut diharapkan peningkatan kapasitas nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, baik dari segi produktivitas maupun kualitas hasil tangkapan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan produksi perikanan secara keseluruhan.

Selain itu, *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya* juga berperan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan. Program ini berfokus pada pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha budidaya perikanan. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi para pelaku usaha, tetapi juga mendorong efisiensi operasional dan manajemen yang lebih baik dalam kegiatan budidaya. Selain dukungan program, faktor eksternal juga turut berkontribusi, seperti kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Agam. Secara keseluruhan, sinergi antara program pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan di daerah ini.

Sasaran 4. Meningkatnya produksi olahan perikanan didukung oleh *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa program tersebut berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi olahan perikanan. Program ini difokuskan pada upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan yang lebih beragam, bermutu, dan berdaya saing, serta didukung dengan penguatan aspek pemasaran produk olahan perikanan.

Intervensi yang dilakukan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi berbagai kegiatan, antara lain fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan, peningkatan mutu dan keamanan pangan produk olahan, serta promosi dan perluasan akses pasar. Dukungan tersebut mendorong pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas dan daya tahan produk, serta memperluas jangkauan pemasaran, sehingga secara keseluruhan berkontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan daya saing olahan perikanan.

Sasaran 5. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, pada periode pelaporan ini belum dapat dilakukan analisis perbandingan antara pelaksanaan program dengan pencapaian sasaran, mengingat hasil penilaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
A.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	76,17%	Penetapan target yang tidak realistis (terlalu tinggi). Realisasi 71,6 sudah tergolong tahan pangan	Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan Daerah serta melakukan penyesuaian target pada renstra terbaru
1.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan daerah	Persentase nagari rawan pangan	103,64%	Penanganan nagari rawanan pangan pada daerah rawan pangan berdasarkan analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan	Memfasilitasi pendanaan dalam menangani daerah rawan pangan dan melakukan sosialisasi kepada lintas sektoral
2.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	182,85%	Meningkatnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang semakin mendekati pola pangan ideal. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta pemanfaatan pangan lokal yang semakin optimal.	Mempertahankan dan meningkatkan upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui penguatan edukasi B2SA, pengembangan dan promosi pangan lokal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam dan seimbang.
B	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	-	Data belum tersedia	Berupaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan
3.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	105,4%	Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya secara tepat sasaran, serta adanya pendampingan teknis kepada nelayan dan pembudidaya ikan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya, memperkuat pendampingan teknis bagi nelayan dan pembudidaya ikan, serta mendorong penerapan teknologi tepat guna guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan produksi perikanan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
4.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	99,2%	meningkatnya aktivitas pengolahan hasil perikanan yang didukung melalui fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan serta pembinaan kepada pelaku usaha olahan perikanan.	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan, memperluas akses pemasaran produk olahan, serta mendorong diversifikasi dan peningkatan mutu produk olahan perikanan agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing
C	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	Data belum tersedia	Berupaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

*menunggu rilis dari Badan Pangan Nasional dan BPS

**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai SAKIP)

3.6 Capaian Anggaran dan Program Kegiatan

Capaian anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan merupakan gambaran tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Uraian mengenai alokasi anggaran yang tersedia, realisasi anggaran yang telah digunakan, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5(4/3*100)
Indikator 1 Skor Pola Pangan Harapan				
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	457,118,110	415,835,848.00	90.97%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	66,427,000	59,320,700	89%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	89,521,710	82,216,754	92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	4,800,000	4,745,000	99%
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	257,899,600	234,700,694	91%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	38,469,800	34,852,700	91%
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	29,755,390	27,980,550	94.04%
	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	29,755,390	27,980,550	94%
Indikator 2 Persentase Nagari Rawan Pangan				
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	120,562,536	92,552,170	76.77%
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4,774,400	2,293,900	48%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)	30,704,075	18,727,100	61%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	67,539,021	62,933,570	93%

	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9,255,040	2,308,300	25%
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi kab/ Kota	8,290,000	6,457,000	78%
Indikator 3 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	58,236,860	55,798,000	95.81%
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10,275,000	9,586,950	93%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	47,961,860	46,211,050	96%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	393,046,500	109,222,030	27.79%
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	293,721,600	12,297,400	4%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	99,324,900	96,924,630	98%
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,179,000	3,732,200	89.31%
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa , Genangan Alr Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	4,179,000	3,732,200	89.3%
Indikator 4 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125,376,368	114,226,474	91.11%
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,653,568	65494274	86.57%
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,722,800	48,732,200	98%
Indikator C Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,649,756,070	3,442,727,933	94%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,596,051,514	2,486,641,708	96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56,225,000	55,892,000	99.4%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,361,480	2,350,000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,984,576	47,749,913	90%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,981,800	16,698,800	98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,164,400	121,363,080	99%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,440,700	70,244,500	92%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,091,500	69,546,561	94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493,516,000	467,570,000	95%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	135,783,100	97,681,371	72%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,050,000	6,990,000	99%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,106,000	14,932,790	99%
Jumlah		4,838,030,834	4.262.075.205	88.1%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat efisien (X) = $\frac{\% \text{ Capaian kinerja}}{\% \text{ Capaian anggaran}}$ yang mana jika,

X > 1 maka efisien

X = 1 maka sesuai

X < 1 maka tidak efisien

Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
A	Indeks ketahanan pangan daerah	94	71,6	76,17%				
1	Skor pola pangan harapan (PPH)	85	88,1	103,64%	486.873.500,-	443.816.398,-	91	1,13
2	Persentase nagari rawan pangan	7%(6 Nagari)	1,2 % (1 Nagari)	182,85%	120.562.536,-	92.552.170,-	76,77	2,38
B	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4,86	*	-				

No	Tujuan/Sasaran Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
3	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	0,73	0,77	105,4%	455.462.360,-	168.752.230,-	37	2,84
4	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,34	1,33	99,2%	125.376.368,-	114.226.474,-	91,11	1,08
C	Nilai SAKIP perangkat daerah	77	*	-	3.649.756.070,-	3.442.727.933,-	94	**-

**menunggu rilis dari Inspektorat (Nilai SAKIP)

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Agam menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,13 yang dikategorikan efisien. Capaian kinerja indikator ini mencapai 103,64%, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 91%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan skor PPH dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif proporsional dan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang diversifikasi dan konsumsi pangan telah berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian target kinerja.

Tingkat efisiensi ini mengindikasikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Program yang berfokus pada diversifikasi pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) mampu mendorong perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Agam secara berkelanjutan.

2. Persentase Nagari Rawan Pangan

Persentase nagari rawan pangan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 2,38 yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Capaian kinerja indikator ini mencapai 182,85%, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 76,77%. Tingginya capaian kinerja yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah menunjukkan bahwa program dan kegiatan

penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Kondisi ini tidak terlepas dari penerapan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dalam penentuan nagari rawan pangan, serta adanya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi. Kolaborasi antarperangkat daerah dalam mendukung peningkatan akses pangan, infrastruktur dasar, dan pelayanan sosial berkontribusi signifikan terhadap percepatan penurunan jumlah nagari rawan pangan di Kabupaten Agam.

3. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 2,84 yang dikategorikan sangat efisien. Capaian kinerja indikator ini mencapai 105,4%, sementara tingkat serapan anggaran tercatat sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif minimal, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di sektor perikanan.

Tingginya efisiensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendukung di luar anggaran, antara lain kondisi lingkungan perairan yang relatif stabil serta tidak terjadinya gangguan signifikan terhadap produksi, seperti kematian massal ikan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya, sehingga mendorong peningkatan produksi secara optimal.

4. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

Persentase peningkatan produksi olahan perikanan di Kabupaten Agam menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,08 yang dikategorikan efisien. Capaian kinerja indikator ini mencapai 99,2%, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 91,11%. Meskipun target belum tercapai secara optimal, realisasi kinerja yang hampir mendekati target menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengolahan hasil perikanan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi olahan perikanan.

Capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pengolahan hasil perikanan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pemanfaatan sarana prasarana yang diterima pelaku usaha serta belum optimalnya jangkauan bantuan. Kondisi ini menjadi

dasar perlunya penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar agar pemanfaatan anggaran ke depan dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang lebih optimal.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021-2025 dengan Tahun 2025–2029. Pada periode renstra lama, perangkat daerah menetapkan 2 Tujuan dengan 5 sasaran dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 (tiga) target, capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 2 (dua) target dan yang belum dilakukan penilaian kinerja karena nilai realisasi belum tersedia sebanyak 2 (dua) indikator.

Periode renstra terbaru terdapat penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dibandingkan dengan periode perencanaan sebelumnya. Dalam Renstra terbaru, perangkat daerah menetapkan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran yang dirumuskan secara lebih terintegrasi untuk mencerminkan upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Periode renstra terbaru, terdapat capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 (dua) target, capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 (satu) target dan yang belum dilakukan penilaian kinerja karena nilai realisasi belum tersedia sebanyak 2 (dua) indikator.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat dianalisis secara optimal karena keterbatasan ketersediaan data dari instansi penyedia

data eksternal. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan perencanaan dan penguatan koordinasi pada periode berikutnya.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra 2025–2029. Secara keseluruhan, realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan mencerminkan upaya efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.2 Langkah Strategis yang Akan Dilakukan oleh OPD untuk Meningkatkan Kinerja Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

Penguatan Ketahanan Pangan Daerah, melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan, antara lain dengan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran Lumbung Pangan Nagari dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Penurunan Tingkat Kerawanan dan Kekurangan Gizi, dengan mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan melalui pemetaan wilayah rawan pangan, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi, serta sinergi lintas perangkat daerah dalam rangka menurunkan nilai Prevalence of Undernourishment (PoU).

Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan, melalui dorongan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan, yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, penyediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi fungsi Balai Benih Ikan.

Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja, dengan memperkuat tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel melalui

peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta penguatan implementasi SAKIP dan keterbukaan informasi publik.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta penguatan sektor perikanan sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Lubuk Basung, Januari 2026



KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
AGAM

ROSVA DESWIRA, S.Pi. M.Si

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19721209 200604 2 007

LAMPIRAN

